

**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA. 2017**  
**(LKIP)**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KOTA BIMA**  
**2018**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Kami sampaikan karena atas ijin-Nya jualah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2017 selesai disusun. LKIP ini disusun sebagai wujud pelaksanaan kewajiban Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta uraian tugas dengan didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Instansi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bima. Melalui Peraturan Walikota Bima No.49 Tahun 2016 DPPKB merupakan instansi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Akhirnya, diharapkan LKIP dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam upaya pencapaian visi dan misi secara keseluruhan.

Raba-Bima, 9 Februari 2018



Drs. H. Suriadi, M.Pd.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19620602 198803 1 016

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Maksud, tujuan dan landasan hukum .....	1
1.2.1. Maksud dan Tujuan.....	1
1.2.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Permasalahan yang dihadapi .....	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah .....	10
2.2. Penjelasan Indikator Utama Tahun 2017 .....	12
2.3. Rencana Kerja Tahunan .....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
3.2. Realisasi Anggaran .....	28
3.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan .....	31
3.2.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya....	32
BAB IV. PENUTUP .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2017, merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kota Bima. Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bima dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan ketahanan Keluarga .

LKIP sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

### **1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM**

#### **1.2.1 . Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan. Langkah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Bima melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017. LKIP diperlukan sebagai alat pertanggung jawaban Dinas PP dan KB Kota Bima atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta atas penggunaan berbagai sumber daya Pemerintah.

Sedangkan yang menjadi tujuan Penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima dalam melaksanakan misinya.

### 1.2.2. Landasan Hukum

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188)
- Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) , dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Untuk uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan , uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.
- Peraturan Kepala BKKBN No. 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat jenis pelayanan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan kegiatan advokasi dan KIE KRR;
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga

- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE).
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota:
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Derah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);
- Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 310)

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima dari :

#### **I. Kepala Dinas.**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk;
4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
6. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas

- Lapangan KB dan Kader KB;
7. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
  8. pelaksanaan Pelayanan KB;
  9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  10. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  11. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **II. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
4. pengelolaan urusan ASN; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian yang dipimpin oleh kepala subbagian, yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Yakni :

1.3.1.1.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

1.3.1.1.2 Subbagian Pelaporan dan Keuangan

## **III. Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Keluarga Berencana Melaksanakan Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
2. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
3. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
4. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
5. pelaksanaan Pelayanan KB;
6. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
8. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana membawahi tiga orang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yakni :

1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber KB.

#### **IV. Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan fungsi :

1. perumusan Kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
5. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
6. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya  
Bidang Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi tiga orang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yakni :
  1. Seksi advokasi dan penggerakan;
  2. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
  3. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

#### **V. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

3. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
4. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
5. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
6. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

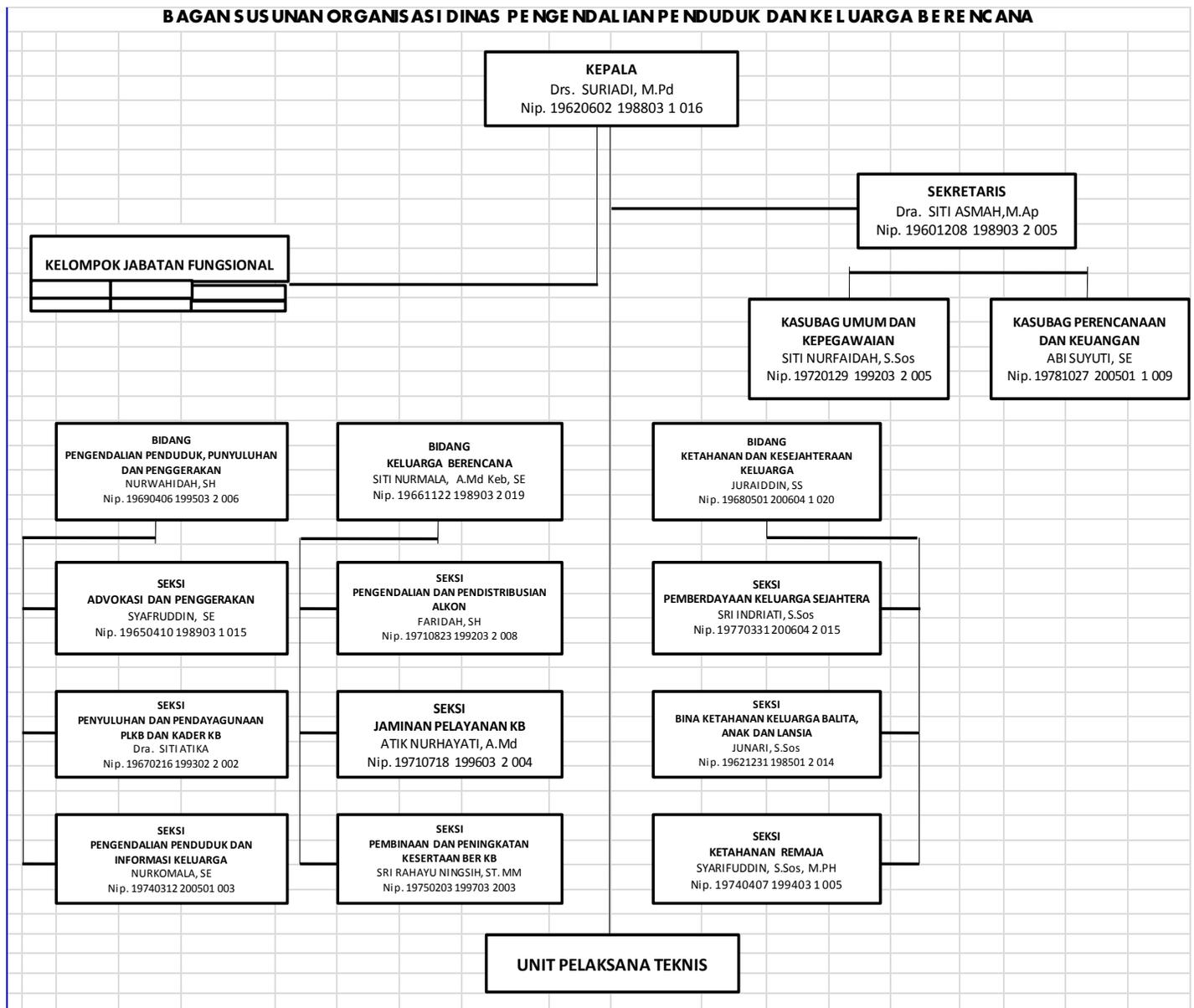
Bidang Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi tiga orang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yakni :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

VI. Kelompok Jabatan Fungsional

VII. Staf

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGEKENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



**1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peranan yang besar dalam hal pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima menemui kendala yang tidak sedikit, kendala dan permasalahan tersebut dirangkum dan dirumuskan menjadi isu strategis yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas PPKB Tahun 2013 – 2018. Diharapkan dalam jangka waktu lima tahun, isu – isu strategis ini dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKB. Isu strategis tersebut, antara lain :

- Bagaimana menekan Laju pertumbuhan penduduk (Total Fertility Rate/TFR) di wilayah kota Bima
- Menekan angka Unmet need yang masih tinggi
- Menekan angka putus pake (DO) akseptor KB yang masih tinggi

- Masih tingginya cakupan PUS yang usia istrinya dibawah 20 Tahun
- Kualitas data dan informasi keluarga belum akurat
- bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menyukseskan program Keluarga Berencana dikota Bima
- upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga yang masih berada dibawah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Berkaitan dengan hal tersebut DPPKB Kota Bima telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sampai tahun 2018 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis DPPKB Kota Bima

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Berdasarkan gambaran ke depan maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan suatu Visi *“Terwujudnya generasi berkualitas melalui keluarga kecil bahagia sejahtera”*.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima menetapkan misi sebagai berikut :

- a. *Meningkatkan Ketahanan Keluarga*
- b. *Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi*
- c. *Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Keluarga Berencana Berbasis Data Mikro*

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum

penyelenggara Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas. Dalam penyelesaian mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara lain penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun tujuan, sasaran jangka menengah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima disajikan dalam table berikut :

Tabel2.1.tujuan danSasaran Strategis Jangka Menengah DPPKB Kota Bima

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terkendalinya jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga	<b>LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK</b>	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,8	2,6	2,4	2,61	2,34
		<b>MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF</b>	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	57,51 %	58,05 %	58,08 %	61,27 %	62,04

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	27,1 %	26,00 %	27,07 %	25.30 %	25,0 %
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	14,00 %	1324, %	12,65 %	6,27 %	5,00 %
			Persentase Peserta KB aktif MKJP	49,00 %	50,00 %	50,15 %	51.15 %	52,00 %
			Jumlah peserta KB aktif tambahan	2,30	2,45	2,50	2.74 %	3.00 %
			Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif	65,00 %	70,00 %	82,00 %	85,00 %	85,00 %
2.	Peningkatan Kualitas Keluarga	MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dibandingkan jumlah total keluarga	40%	45 %	45%	45%	30%

## 2.1 Penjelasan Indikator Utama Tahun 2017

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2017 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapaisasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Bima Tahun 2017-2018. Indikator

Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi DPPKB Kota Bima..

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama DPPKB Kota Bima Tahun 2017 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel2.2. Formulasi penjelasan Indikator Kerja Utama DPPKB Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	<b>LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK</b>	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	<b>2.61%</b>	Jumlah Kelahiran Hidup laki2 dan perempuan hingga akhir masa reproduksi
2.	<b>MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF</b>	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	<b>61.27%</b>	Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi modern dibagi pasangan usia subur yang ber KB X 100
		Persentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	<b>25.30%</b>	Jumlah PUS ber KB yang putus pakai di bagi jumlah PUS ber-KB X 100%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	<b>6.27%</b>	Jumlah PUS yang ingin ber KB tapi tak terlayani (lat + tial) di bagi jumlah PUS (15-49THN) X 100%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yg menjadi peserta KB aktif	<b>85%</b>	Jumlah PUS yang menjadi Peserta KB aktif dibagi jumlah PUS X 100
		Persentase Peserta KB aktif MKJP	<b>51.15%</b>	Jumlah PUS ber- KB MKJP dibagi jumlah PUS ber KB aktif X 100%
		Jumlah peserta KB aktif tambahan	<b>2.74%</b>	Jumlah PUS Peserta KB baru di bagi Jumlah PUS ber KB X 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
3.	<b>MENINGKAT NYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERA AN KELUARGA</b>	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	<b>45%</b>	Jumlah keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dibagi jumlah total keluarga x 100

### 2.3 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPPKB Kota Bima tahun 2017 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Bima Tahun 2013-2018 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2017.

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPPKB Kota Bima Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	<b>LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK</b>	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	<b>2.61%</b>
2	<b>MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF</b>	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	<b>61.27%</b>
		Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	<b>25.30%</b>
		Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	<b>6.27%</b>
		Persentase Peserta KB aktif MKJP	<b>51.15%</b>
		Jumlah peserta KB aktif tambahan	<b>2.74%</b>
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif	<b>85%</b>
3	<b>MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	<b>45%</b>

### 2.4. Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian/Penetapan Kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja.Penetapan /

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Bima dapat dilihat dalam table sebagai berikut

Tabel : Penetapan Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	<b>LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK</b>	1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	<b>2.61%</b>
2.	<b>MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF</b>	1 Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	<b>61.27%</b>
		2 Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	<b>25.30%</b>
		3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	<b>6.27%</b>
		4 Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	<b>85%</b>
		5 Persentase Peserta KB aktif MKJP	<b>51.15%</b>
		6 Jumlah peserta KB aktif tambahan	<b>2.74%</b>
3.	<b>MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	1 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	<b>45%</b>

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	405.844.500	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	515.777.000	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34.250.000	
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17.780.000	
5 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	99.960.000	
6 Program Keluarga Berencana	289.668.000	
7 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	115.724.600	
8 Program Pelayanan Kontrasepsi	924.650.000	
9 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	215.315.000	
10 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi &	23.112.500	

	Konseling KRR	
11	Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	11.010.000
12	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	29.280.000
13	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.	21.070.000

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

LKIP 2017 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Pengukuran Kinerja dalam rangka untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pencapaian sasaran dilakukandengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yangtelah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam :

1. Indikator bermakna positif , artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus panjang

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Urutan	Rentang capaian	Kategori capaian
I	>100%	Sangat berhasil
II	91%-100%	Berhasil
III	81%-90%	Cukup Berhasil
IV	<81%	Kurang Berhasil

### 3.1 Capaian Kinerja organisasi

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bima memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, hasil pengukuran/ realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.Sasaran strategis, indikator kinerja, target danrealisasi capaian kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2.61%	2,36 %	109,58
MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF	2 Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptve prevelance rate/mCPR)	61.27%	50,31%	82,11
	3 Presentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25.30%	13,28%	147,51
	4 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	6.27%	8,86%	58,69
	5 Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	85 %	86,63%	101,17 %
	6 Persentase Peserta KB aktif MKJP	51.15%	50,13%	98,01
	7 Jumlah peserta KB aktif tambahan	2.74%	11,12%	405,84
	8 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	45%	32%	128,89

## Sasaran

### 1 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

**Indikator : Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran. Yakni angka kelahiran total dibandingkan dengan jumlah total Wanita Usia Subur sebagai mana tergambar dalam table berikut :

Tabel 3.1.capaian sasaran stragis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian	%
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2.61%	2,36 %	109,58%

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Angka Kelahiran total (Total FertilityRate/TFR)Per WUS yang di targetkan 2.61 % realisasi 2,36 % atau 109,58 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 163.101 jiwa dengan jumlah WUS (15-49 tahun ) sebesar 35.453 orang.tfr sebesar 2,36 berarti wanita usia 15-49 thn secara rata2 mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.

Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis I pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2017 DPPKB Kota Bima mengalami peningkatan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel3.3.  
Perbandingan Realisasi KinerjaDPPKB  
dalam Pencapaian Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,4%	2,37%	101,25%	2,61%	2,36%	109,58 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran strategis I menunjukkan bahwa pada tahun 2016 memiliki capain 101,25% sedangkan di tahun 2017 menunjukkan peningkatan capaian yakni sebesar 109,58 % . Pencapaian ini memenuhi target nasional untuk TFR perwus dalam RPJM 2015-2019 program KKB sebesar 2,36

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2017-2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

.Tabel 3.4.  
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun rencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi sampai tahun 2017	% Capaian
<b>LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK)</b>	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,34 %	2,36 %	99,15%

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I tersebut, selama tahun 2017, DPPKB Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/ kegiatanyang dijabarkan kedalam kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5.  
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK)</b>	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	54.819.500
	Orientasi Kader Pendataan Keluarga	43.858.000
	Operasional Kader pendataan keluarga	45.960.000
	Monitoring kegiatan pendataan keluarga	15.060.000

## 2 MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
<b>MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF</b>	1 Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	<b>61.27%</b>	50,31%	82,11%
	2 Presentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	<b>25.30%</b>	13,28%	147,51%

	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6.27%	8,86%	58,69%
	4	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	85%	86,63%	101,17%
	5	Persentase Peserta KB aktif MKJP	51.15%	50,13%	98,01%
	6	Jumlah peserta KB aktif tambahan	2.74%	11,12%	405,84
<b>Rata-rata</b>					148,89%

Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis II pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2017 DPPKB Kota Bima mengalami peningkatan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel3.3.  
Perbandingan Realisasi Kinerja DPPKB  
dalam Pencapaian Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	60%	58,43%	97,38	61,27%	50,31 %	82,11
Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	27,07%	23,22%	114,22%	25.30%	13,28%	147,51%
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,65%	11,25%	111,07%	6,27%	8,86%	58,69%
Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	82,00%	83%	101,22%	85%	86,63 %	101,17%
Persentase Peserta KB aktif MKJP	50,15	48,21%	96,13%	51.15%	50,13%	98,01%
Jumlah peserta KB aktif tambahan	2,50%	2,65%	106,00%	2.74%	11,12%	405,84%

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Rata-rata			104,34%			148,89%

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja enam indikator sasaran strategis II pada tahun 2016 memiliki rata-rata capaian 104,34% sedangkan di tahun 2017 menunjukkan peningkatan capaian sampai dengan 148,89% atau dengan tingkat kenaikan 40,79%.

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2017-2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4.  
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis II terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi sampai tahun 2017	% Capaian
<b>MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF</b>	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	62,04%	50,31 %	81,09%
	Presentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25,00%	13,28 %	146,88%
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,00%	8,86 %	22,80%
	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	85,00%	86,63%	101,92%
	Persentase Peserta KB aktif MKJP	52,00%	50,13 %	96,40%
	Jumlah peserta KB aktif tambahan	3,00%	11,21%	373,67%

### **1. Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)**

Tingkat capaian kinerja untuk indicator persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence(mCPR) yang ditargetkan sebesar 61,27% terealisasi sebesar 50,31% atau 82,11% dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah pemakaian kontrasepsi modern adalah 12.248 Akseptor dari seluruh Pasangan Usia Subur aktif sejumlah 24.345 Akseptor.

Pencapaian kinerja indicator presentase pemakaian kontrasepsi modern tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016 sebesar 51,32% ( 12.054 Akseptor dan 23.486 peserta KB Aktif) %. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 82,11% masuk dalam kategori capaian “cukup berhasil”.

### **2. Presentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi**

Tingkat capaian kinerja untuk indicator angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi atau drop out yang ditargetkan sebesar 25,30% terealisasi sebesar 13,28% atau 147,51% dari target yang ditetapkan. Dengan penjelasan jumlah akseptor yang mengalami tingkat putus alat kontrasepsi atau D.O sejumlah 3.234 dari seluruh peserta KB aktif sejumlah 24.345 akseptor. Dibandingkan dengan angka drop out pada tahun 2016 adalah sebesar 4.806.orang atau 20%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 147,51% masuk dalam kategori capaian “sangat berhasil”.

### **3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang di targetkan 6,27% realisasi 8,86% atau 58,69% dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah Unmet Need 2.490 Akseptor terdiri dari Jumlah Ingin Anak Ditunda (IAD) 1.261 Akseptor dan Jumlah Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) 1.229 Akseptor.dibandingkan dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 28.101 (Sumber: Rek.Kab.F/I/Dal/13),

pencapaian pada tahun 2017 tingkat indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB (unmet need) mengalami penurunan.angka unmet need tahun 2016 adalah sebesar 11,00%. dan dibandingkan dengan target nasional untuk tahun 2017 angka Unmet need kota Bima Tahun 2017 melampaui target,

target nasional unmet need adalah sebesar 11,25. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 8,86% atau mencapai 58,69 yang berarti masuk dalam kategori capaian “Kurang berhasil”.

#### **4. Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif**

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB Aktif Kota Bima terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang di targetkan 85,00 % realisasi 86,63 % atau terealisasi sebesar 101,17% dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah peserta KB Aktif 24.345 Akseptor dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 28.101, ini berarti mengalami peningkatan dibandingkan tingkat capaian pada tahun 2016. Capaian 2017 ini melebihi target nasional (target SPM) sebesar 77,5% (Sumber: Rek.Kab.F/II/Dal/13), Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 101,17% yang berarti masuk dalam kategori capaian “sangat berhasil”.

#### **5. Jumlah peserta KB aktif tambahan**

Tingkat capaian kinerja untuk indikator peserta KB aktif tambahan yang ditargetkan sebesar 2,74 % realisasi sebesar 11,12% atau sebesar 405,84 % dari target yang ditetapkan. Dengan penjelasan peserta KB aktif tambahan berjumlah 2.709 akseptor. Terdiri dari 458 Akseptor, MOW 8 Akseptor, MOP 0, Kondom 56 Akseptor, Implan 977 Akseptor, suntik 1.146 Akseptor serta PIL 64 Akseptor. Dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2016 sebesar 7,8%. (Sumber: REK.KAB. F/II/KB/13), Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 405,84% yang berarti masuk dalam kategori capaian “sangat berhasil”.

#### **6. Persentase Peserta KB aktif MKJP**

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB aktif MKJP yang di targetkan 51,15 % realisasi 50,31 % atau 98,01 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan peserta KB MKJP 12.248 Akseptor terdiri dari IUD 6.531 Akseptor, MOW 1.256 Akseptor, MOP 74 Akseptor dan Implant 4.387 Akseptor. Dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2016 sebesar 50,23 %. (Sumber: REK.KAB. F/II/KB/13), Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 98,01% yang berarti masuk dalam kategori capaian “berhasil”.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II tersebut, selama tahun 2017, DPPKB Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/ kegiatan yang dijabarkan kedalam kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5.

Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis II	Jumlah Anggaran (Rp)
	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	91.970.000
	Pelayanan KIE	119.425.000
	Pembinaan Keluarga Berencana	51.270.000
	Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana	26.215.000
	Pelayanan konseling KB	546.375.000
	Pengadaan alat kontrasepsi	201.053.000

### 3 MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

#### Indicator Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel3.1.

Perbandingan Realisasi Kinerja DPPKB dalam Pencapaian Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	45%	32 %	128,89 %

Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis III pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2017 DPPKB Kota Bima mengalami peningkatan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel3.2.  
Perbandingan Realisasi Kinerja DPPKB  
dalam Pencapaian Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	45%	38 %	115,56%	45 %	32 %	128,89%

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2017-2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3.  
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis III terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi sampai tahun 2017	% Capaian
<b>MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	30 %	32 %	83,01%

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis III tersebut, selama tahun 2017, DPPKB Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/ kegiatanyang dijabarkan kedalam kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4  
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis III	Jumlah Anggaran (Rp)
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	21.070.000
	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	91.874.600

Tingkat capaian kinerja untuk indikator presentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I yang ditargetkan sebesar 45 % realisasi sebesar 32% atau 140,6 % dari target yang ditetapkan. Dengan penjelasan jumlah keluarga pra

sejahtera dan pra sejahtera I sejumlah 11.286 Orang Kepala Keluarga dibandingkan dengan seluruh keluarga yang terdata sejumlah 35.627 Kepala Keluarga. Dibandingkan capaian pada tahun 2016 keluarga pra sejahtera dan prasejahtera I berjumlah 15.235 KK dari 35.627 KK atau 45%. Artinya pencapaian kinerja untuk indikator presentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I mengalami peningkatan ditahun 2017.(Sumber: REK.KAB. F/II/KB/13),

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 128,89 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “sangat berhasil”.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Sesuai dengan yang termuat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 untuk mendukung sasaran strategis yang telah diperjanjikan maka dilaksanakan 13 (tiga belas) program dengan 44 kegiatan dan realisasi keuangan untuk masing – masing program dan kegiatan prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Perbandingan target dan realisasi kinerja SKPD DPPKB tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>A. PROGRAM PELAYANAN</b>				
<b>ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.318.000	27.317.000	99,99
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	66.060.000	57.200.826	86,59
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27.050.000	21.890.700	80,93
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.780.000	5.1780.000	100
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.810.000	13803000	99,95
6.	Penyediaan alat tulis kantor	31.902.500	31.901.900	100
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.840.000	25.515.000	95,06
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.105.000	2.102.000	99,86
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18.500.000	18.500.000	100
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000	3.490.000	96,94
11.	Penyediaan makanan dan minuman	18.660.000	14.884.000	79,76
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	227.334.000	219.574.340	96,59
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	9.585.000	9.510.000	99,22
<b>B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	663.970.000	628.832.000	96,77
2.	Pengadaan mebeluer	3.600.000	3.600.000	100
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.349.000	12.349.000	100
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	97.628.000	94.320.950	96,61
5.	Pemeliharaan rutin/berkala	23.265.000	2.3265.000	100

	perlengkapan gedung kantor			
6.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.450.000	24.450.000	100
<b>C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	33.000.000	33.000.000	100
<b>D. PROGRAM PENINGKATAN KPASITAS SDM APARATUR</b>				
1.	Pelaksanaan Penilaian AKJG	17.780.000	17.780.000	100
<b>E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.760.000	21.760.000	100
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.520.000	9.520.000	100
3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.520.000	9.520.000	100
4.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.120.000	40.120.000	100
5.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	19.040.000	19.040.000	100
<b>F. PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>				
1.	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	91.970.000	90.220.000	98,10
2.	Pelayanan KIE	119.425.000	119.425.000	100
3.	Pembinaan Keluarga Berencana	51.270.000	51.270.000	100
4.	Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana	26.215.000	25.760.520	98,27
<b>G.PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA</b>				
1.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	23.850.000	23.850.000	100
2.	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	91.874.600	91.162.500	99,22
<b>H. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI</b>				
1.	Pelayanan konseling KB	546.375.000	495.317.393	90,66
2.	Pengadaan alat kontrasepsi	201.053.000	200.089.000	99,52
<b>I. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI</b>				

1.	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	54.819.500	51.331.000	93,64
2.	Orientasi Kader Pendataan Keluarga	43.858.000	41.127.000	93,77
3.	Operasional Kader pendataan keluarga	45.960.000	44.880.000	97,65
4.	Monitoring kegiatan pendataan keluarga	15.060.000	10.260.000	68,13
5.	Koordinasi pengelolaan program	34.517.500	26.707.000	77,37
<b>J. PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR</b>				
1.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	15.872.500	15.872.500	100
2.	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	7.240.000	7.240.000	100
<b>K. PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS</b>				
1.	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	11.010.000	11.010.000	100
<b>L. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK</b>				
1.	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	29.280.000	29.280.000	100
<b>M. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA</b>				
1.	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	21.070.000	21.070.000	100

### 3.2.1 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN:

- a. Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif; Pencapaian akseptor KB aktif tambahan , meningkatnya penggunaan kontrasepsi modern, serta menurunnya angka Drop Out/ Ketidak Kerlangsungan KB pada Tahun 2017 yang dapat memenuhi target dan bahkan melampaui target propinsi dan Nasional menandakan tingginya kesadaran masyarakat terutama pasangan usia subur akan pentingnya program keluarga berencana yang pada akhirnya dapat

menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hal antara lain :

- Adanya kuantitas dan kualitas pelayanan KB yang semakin baik.
- Adanya garis komando dan garis koordinasi yang jelas
- Adanya pembagian tugas yang jelas di jajaran DPPKB .
- Adanya penyediaan alat dan obat kontrasespsi yang selalu ada pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada (Klinik KB).
- Adanya segmentasi sasaran yang jelas, sehingga mengetahui siapa dan dimana PUS yang belum ber-KB
- Kemampuan dan kapasitas tenaga lini terdepan yaitu Penyuluh KB yang semakin baik,
- Adanya kerjasama maupun dengan stakeholder (mitra kerja) yang ada seperti Kantor Kementerian Agama kota Bima, Penyuluh Agama, Dinas Kesehatan, Kepala KUA Kecamatan serta institusi-institusi Kelurahan yang ada seperti PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka ikut menyukseskan pengelolaan program keluarga berencana
- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah dilakukan pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok UPPKS, BKB, BKR, serta BKL. Selaian itu pada tahun 2017 dilakukan orientasi BKB, BKR, BKL bagi kader dan berbagai kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga khususnya bagi keluarga pra sejahtera dan KS I. Dan melakukan advokasi/KIE kepada Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan LSM dalam rangka meningkatkan pencapaian program dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dimasing-masing kelurahan, sehingga program KB merupakan kebutuhan bagi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

b. Presentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) belum dapat memenuhi target baik target kota maupun target Nasional (SPM) hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain :

- Aktifitas pendataan yang masih kurang maksimal
- Jaringan pelayanan yang masih kurang
- Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) yang belum optimal
- Kurangnya anggaran sosialisasi/ promosi KB
- Kurang optimalnya monitoring di lini lapangan

solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB di seluruh kecamatan dan kelurahan sehingga

Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda dapat diberikan pelayanan KB, serta dengan mengintensifkan pelayanan KIE serta promosi KB.

### 3.3.2 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Pemanfaatan sumberdaya yang ada pada DPPKB Kota Bima, dapat dikatakan efisien, karena dengan anggaran yang terbatas, dapat menghasilkan pencapaian kinerja yang sangat tinggi. Dari sisi sumberdaya manusia, masih belum memadai baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas, tetapi dengan memanfaatkan pola tanggungjawab dan jalur koordinasi yang semakin baik, maka dapat mendukung pencapaian kinerja dengan baik.

Realisasi anggaran DinasPP dan KB Kota Bima Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp. 6.176.741.093,-** atau **98%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 6.330.529.813,65.**

Rincian Realisasi Anggaran yang telah digunakan Tahun 2017 dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 15. RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BPPKB TAHUN 2017

No	Uraian	Anggaran Yang Tersedia (Rp)	Realisasi Anggaran Yang digunakan (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Tidak	Rp 3.399.263.213,67	Rp.3.372.125.464,00	
2.	Langsung Belanja Langsung	Rp 2.931.266.600,00	Rp. 2.804.615.624,00	
JUMLAH		Rp 6.330.529.813,67	Rp.6.176.741.093,00	98 %
1.	Kegiatan yang terhambat tidak ada.	-	-	-
JUMLAH			Rp. 0.00	

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Media ini juga dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan program pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga tahun 2018. Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada, maka pencapaian indikator kinerja bidang pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, tujuh dari delapan indikator dapat memenuhi dan bahkan melampaui target yang ditetapkan dan hanya satu indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan .
2. Keberhasilan yang dimaksud di atas adalah besarnya capaian kinerja yang lebih besar dari target, baik itu target tahun 2017, target RPJMD maupun target nasional strategis.

Realisasi anggaran pada Badan PP dan KB Kota Bima Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp. 6.176.741.093,00** atau **98 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 6.330.529.813,67**.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kami buat, semoga bermanfaat, terima kasih.

Raba-Bima, Januari 2018

Kepala,  
  
Drs. H. Suriadi, M.Pd.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19620602 198803 1 016